

## Meningkatkan Pengetahuan Kewarganegaraan Mahasiswa melalui Mata Kuliah Pancasila

Dzakka Khairana Wandeka<sup>1</sup> T Heru Nurgiansah<sup>2</sup> Egi Rian Januri<sup>3</sup>

Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju, Jurusan Teknik Pengcoran Logam, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [khairanawandeka@gmail.com](mailto:khairanawandeka@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Strategi pembelajaran mata kuliah Pancasila yang efektif untuk memperkuat *civic knowledge* mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini menelaah artikel jurnal penelitian, buku, silabus, serta dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Data dianalisis secara deskriptif-analitik dan disintesis secara tematik untuk membandingkan temuan antar sumber. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual meliputi *blended learning*, diskusi berbasis isu aktual (*Problem Based Learning*), *Project Based Learning*, dan *student centered learning* konsisten meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, serta keterlibatan sosial mahasiswa dibandingkan metode konvensional. Kendala utama yang teridentifikasi adalah praktik pengajaran yang masih normatif dan monoton, bahan ajar yang kurang kontekstual, serta sistem evaluasi yang cenderung berorientasi pada hafalan sehingga kurang mampu mengukur ranah afektif dan keterampilan kewarganegaraan. Berdasarkan temuan tersebut, perlunya integrasi pembelajaran berbasis masalah/proyek, pengembangan modul kontekstual berbasis studi kasus, peningkatan kapasitas dosen dalam metode pembelajaran aktif, serta perancangan instrumen asesmen komprehensif. Implikasi kebijakan mencakup pemanfaatan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memperluas pengalaman nyata mahasiswa dalam internalisasi nilai Pancasila. Penelitian lanjutan direkomendasikan berupa evaluasi empiris intervensi pembelajaran untuk mengukur dampak kuantitatif terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku kewarganegaraan mahasiswa.

**Kata Kunci:** Pancasila, *Civic Knowledge*, *Blended Learning*, *Project Based Learning*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa sebagai modal dasar berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Di era globalisasi, pengaruh budaya dan informasi yang masuk dari luar negeri semakin kompleks dan dapat memberikan peluang maupun tantangan bagi identitas nasional Indonesia (Benawa et al., 2023). Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memperkuat Pendidikan kewarganegaraan agar mahasiswa memiliki fondasi pengetahuan yang kokoh. Lembaga Pendidikan, khususnya program studi Pancasila, diharapkan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sistem kenegaraan, konstitusi, hak, dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Penelitian (A'rafiyah et al., 2019) menegaskan bahwa jenjang Pendidikan tinggi berperan vital dalam mengembangkan sumber daya yang memiliki keterampilan kewarganegaraan dan informasi politik agar mempunyai terlibat dalam kegiatan politik.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi landasan utama Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) di semua program studi. (Dewantara et al., 2019) membuktikan bahwa Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila dan

bahwa Pancasila harus menjadi landasan seluruh aspek pembelajaran kewarganegaraan. Beberapa hasil studi menunjukkan pentingnya upaya peningkatan pengetahuan dan nilai kebangsaan melalui pembelajaran aktif. (Nurdyanti et al., 2023a) menerapkan model *Project Based Learning* pada mata kuliah Pancasila dan menemukan bahwa hal tersebut dapat memperkuat keterlibatan sosial mahasiswa. Para mahasiswa menjadi lebih peka terhadap kontekstual melalui kegiatan lapangan. Begitu dengan (Nurdyanti et al., 2023a) melaporkan bahwa metode pembelajaran efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa. Selain itu, (Biringan et al., 2025) menyoroti pentingnya pendekatan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*) dalam mata kuliah Pancasila agar mahasiswa lebih memahami identitas nasional dan keunikan bangsa Indonesia. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa inovasi pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi sudah mulai di garap untuk memperkuat karakter dan partisipasi mahasiswa. Namun, beberapa studi menunjukkan cenderung rendahnya minat dan pemahaman mahasiswa terhadap materi Pancasila dan kewarganegaraan, pada penelitian (A'rafiyah et al., 2019) menemukan bahwa rata-rata pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa masih tergolong sedang, sementara partisipasi politik mereka relative tinggi. Di sisi lain, (Benawa et al., 2023) mengamati adanya penurunan pemahaman Pancasila dan nilai kewarganegaraan dikalangan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kekosongan antara tujuan kurikulum dengan kenyataan pembelajaran di lapangan meskipun Pancasila wajib diajarkan, pengetahuan mahasiswa belum optimal.

Tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan partisipasi politik yang bermutu oleh warga negara, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi (Benawa et al., 2023):

1. Penguasaan pengetahuan kewarganegaraan.
2. Kemampuan berpikir kritis dan pastisipatif.
3. Pengembangan karakter.
4. Komitmen pada nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, hak dan kewajiban warga, serta prosedur pemerintahan. Dalam konteks Kurikulum 2013, pengetahuan kewarganegaraan disebut sebagai salah satu tujuan utama pembelajaran PPKn yang terkait erat dengan partisipasi politik mahasiswa (A'rafiyah et al., 2019). Dengan demikian, secara teoritis peningkatan *civic knowledge* mahasiswa melalui mata kuliah Pancasila akan memperkuat kompetensi kewarganegaraan mereka dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional (yaitu membentuk insan berkarakter dan berwawasan kebangsaan). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai implementasi khusus mata kuliah Pancasila untuk meningkatkan civic knowledge mahasiswa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek pengembangan karakter atau peningkatan keterlibatan sosial-mahasiswa melalui inovasi pembelajaran Pancasila (Nurdyanti et al., 2023a). Hanya sedikit penelitian yang mengukur dampak program Pancasila terhadap peningkatan pemahaman konkret mahasiswa tentang hak, kewajiban, dan sistem berbangsa di Indonesia. Padahal, rendahnya pemahaman ini dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan untuk mengisi kekosongan ini diperkuat oleh temuan penurunan minat dan pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa. Keaslian (orisinalitas) penelitian ini terletak pada fokus eksplisitnya untuk merancang dan mengkaji strategi penguatan materi atau metode pengajaran dalam mata kuliah Pancasila yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi strategi dan pendekatan pembelajaran Pancasila yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kewarganegaraan. Hasil penelitian diharapkan mempertegas kontribusi pendidikan Pancasila dalam penguatan literasi kewarganegaraan mahasiswa, sehingga dapat memperkokoh karakter dan partisipasi politik generasi muda di perguruan tinggi Indonesia. Penelitian ini penting karena akan membantu dosen dan pengembang kurikulum menyusun materi dan metode pembelajaran yang lebih fokus pada konten kewarganegaraan, serta memberikan manfaat bagi mahasiswa agar menjadi warga negara yang lebih sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab (Biringan et al., 2025).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data berasal dari artikel jurnal penelitian, buku, silabus, dokumen kebijakan Pendidikan tinggi yang relevan, dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif analitik, dengan fokus pada penelaahan isi untuk menilai relevansi konsep *civic knowledge*, kesesuaian materi Pancasila dalam kurikulum, dan keterkaitan praktik pembelajaran dengan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa. Temuan disintesis secara tematik dan dibandingkan antar sumber untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi praktis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka terkini menunjukkan beragam strategi pembelajaran Pancasila yang efektif memperkuat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *blended learning* yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman kosnceptual dan *civil knowledge* mahasiswa. (Cahyono et al., 2023) menyatakan bahwa penggunaan *blended learning* dengan sistem pembelajaran daring terbimbing secara signifikan meningkatkan skor pengetahuan kewarganegaraan disbanding metode konvensional. Selain itu, diskusi berbasis isu aktual terbukti memacu berpikir kritis dan analitis. Pendekatan *problem based learning* yang menyajikan isu-isu kebangsaan terkini mendorong mahasiswa aktif berdiskusi dan menganalisis persoalan bangsa dari berbagai sudut pandang (Mathilda, 2019). Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dapat memahami konsep-konsep Pancasila lebih dalam ketika dihadapkan pada konteks nyata, sesuai tujuan Pendidikan Pancasila untuk melatih berpikir kritis dan bertindak demokratis. Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat empat metode pembelajaran dalam penguatan *civil knowledge* dalam bidang kewarganegaraan pada mata kuliah pancasila untuk mahasiswa.

1. *Blended Learning*. Model pembelajaran campuran dengan sistem online terbimbing terbukti meningkatkan skor civic knowledge mahasiswa. Studi eksperimen menunjukkan rata-rata nilai post-test Pancasila yang lebih tinggi ketika siswa mengikuti pembelajaran blended learning asinkron dibanding kelas control (Cahyono et al., 2023).
2. Dikusi isu aktual/ *Problem Based Learning*. Pembelajaran yang melibatkan *case study* dan diskusi kelompok tentang isu sosial-politik terkini membuat mahasiswa lebih kritis dan aktif. Model *Problem Based Learning* (PBL) dengan tugas diskusi isu aktual mendorong mahasiswa cepat merespons informasi, mengolah data, dan berargumentasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata (Mathilda, 2019).
3. *Project Based Learning*. Pendekatan berbasis proyek (*Project Based Learning*) yang mengangkat permasalahan riil masyarakat menghubungkan nilai Pancasila dengan pengalaman mahasiswa. Kajian literatur merekomendasikan penerapan PJBL untuk mengaktualisasikan nilai kebangsaan dan meningkatkan keterlibatan warga (*civic engagement*) mahasiswa (Nurdyanti et al., 2023b).

4. *Student Centered Learning.* Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan tugas kelompok dan diskusi fenomena lokal menumbuhkan semangat kebangsaan. (Anif Istianah dkk., 2021) menemukan perkuliahan Pancasila efektif ketika mahasiswa dibagi kelompok diskusi untuk mempresentasikan materi dan membahas kasus lokal maupun nasional. Tugas berbasis masalah sosial di wilayah set pat dan kearifan lokal yang diintegrasikan ke dalam diskusi kelas terbukti memperkokoh internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Tantangan analisis mengidentifikasi sejumlah masalah dan kesenjangan dalam implementasi pembelajaran Pancasila yang berdampak pada rendahnya civic knowledge mahasiswa:

1. Metode Konvensional dan Monoton. Banyak perkuliahan Pancasila masih bersifat normatif dan satu arah (ceramah) sehingga mahasiswa kurang terlibat aktif. Laporan PSBPS UMS (2019) menyebutkan materi ajar Pancasila cenderung kognitif normatif dengan metode mengajar monoton (ceramah dan tanya jawab terbatas) yang membuat proses belajar membosankan. Hal ini menyebabkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam kuliah rendah.
2. Materi Kurikulum dan Buku Ajar Tidak Kontekstual. Struktur buku ajar dan mata kuliah Pancasila sering kali belum lengkap dan terlalu berfokus pada aspek kognitif abstrak. Modul ajar yang dominan memuat teori tanpa studi kasus konkret mengakibatkan kurangnya ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah serius.
3. Evaluasi Pembelajaran Terbatas. Sistem evaluasi yang masih berorientasi pada pengingatan (misalnya soal pilihan ganda hafalan) belum mengukur penguasaan kompetensi sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Rendahnya variasi evaluasi membuat lembaga sulit memonitor perkembangan pemahaman nilai Pancasila secara keseluruhan.

Solusi untuk menanggulangi tantangan tersebut:

1. Pembelajaran Berbasis Masalah/Proyek. Mendorong implementasi PBL/PJBL dalam mata kuliah Pancasila untuk menghubungkan pembelajaran dengan isu-isu nyata. Banyak studi menegaskan bahwa model PBL dengan tugas lapangan atau proyek sosial membuat mahasiswa lebih aktif menyelidiki dan menerapkan nilai Pancasila, serta membangun tanggung jawab warga negara.
2. Materi dan Modul Kontekstual. Menyusun buku ajar Pancasila yang kaya akan konteks. Disarankan penambahan studi kasus terkini, fenomena nasional/lokal, serta integrasi nilai profil pelajar Pancasila (seperti toleransi, gotong royong, dan bela negara). Pendekatan pembelajaran yang kontekstual (misalnya simulasi demokrasi, pemecahan kasus sosial nyata) akan meningkatkan relevansi dan pemahaman kebangsaan mahasiswa.
3. Pengembangan Profesional Dosen dan Evaluasi. Menyelenggarakan pelatihan metode inovatif bagi dosen Pancasila agar mampu merancang pembelajaran interaktif. Penting pula menyusun instrumen penilaian yang meliputi ranah afektif, sehingga capaian pembelajaran Pancasila dapat dievaluasi secara komprehensif.

## Pembahasan

Hasil sintesis ini memperkuat pandangan teoritis bahwa pendidikan Pancasila sebaiknya dirancang secara konstruktivistik dan berpusat pada pengalaman mahasiswa. Pada penelitian (Mathilda, 2019) menegaskan bahwa Pancasila Education bertujuan melatih mahasiswa berpikir kritis dan bertindak demokratis berdasarkan Pancasila. Hasil analisis mendapatkan bahwa strategi pembelajaran inovatif (diskusi isu aktual, blended learning, PBL) sejalan dengan tujuan tersebut, karena terbukti menumbuhkan kemampuan analitis dan keterlibatan aktif mahasiswa. Ketertarikan mahasiswa terhadap materi pembelajaran akan memicu keaktifan

dan pemahaman yang lebih mendalam Jumal polbenacid. Dengan demikian, pendekatan yang menantang dan kontekstual (seperti yang direkomendasikan dalam temuan) dipandang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar dan penyerapan nilai-nilai Pancasila. Dari sudut kurikulum, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mencakup *civic knowledge*, dan *civic skills*. Peningkatan *civic knowledge* (pemahaman tentang konstitusi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta nilai kebangsaan) efektif dicapai melalui pembelajaran kontekstual. konsep profil pelajar Pancasila menekankan sikap toleran, gotong royong, dan kreativitas, yang menuntut metode pembelajaran yang mampu membangun karakter dan literasi digital mahasiswa. Pendekatan digital *citizenship* dalam pembelajaran Pancasila yang diusulkan oleh (Mahardhani & Roziq Asrori, 2023) memadukan internalisasi nilai melalui teknologi, yang relevan dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan MBKM pada dasarnya mendorong implementasi pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata. Secara keseluruhan, hasil sintesis ini menegaskan bahwa pembelajaran Pancasila yang efektif bukanlah transfer nilai secara deklaratif, tetapi proses aktif siswa menyampaikan pemahaman kewarganegaraan melalui konteks nyata. Strategi-strategi yang ditemukan (*blended learning*, PBL, diskusi kontekstual, digital citizenship) konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya dan praktik terbaik internasional. Sinergi antara teori pendidikan kewarganegaraan dan hasil kajian pustaka mengindikasikan bahwa inovasi Pancasila perlu dikedepankan untuk mengatasi tantangan era modern dan meningkatkan pemahaman kebangsaan mahasiswa secara substansial.

## KESIMPULAN

*Civic knowledge* mahasiswa melalui mata kuliah Pancasila lebih efektif dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual-seperti *blended learning*, diskusi berbasis isu aktual (*Problem Based Learning*), *Project Based Learning*. Serta pendekatan *student centered* dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Kajian ini mengidentifikasi hambatan substantif dalam praktik pembelajaran saat ini, dengan kecenderungan metode yang monoton, bahan ajar yang kurang mengakomodasi konteks lokal dan nasional, serta sistem evaluasi yang masih berfokus pada hafalan sehingga tidak memadai untuk mengukur ranah efektif dan keterampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang meliputi integrasi pembelajaran berbasis masalah atau proyek, pengembangan modul ajar yang kontekstual dan berbasis studi kasus, peningkatan kapasitas dosen dalam desain dan pelaksanaan metode pembelajaran aktif, serta perancangan instrumen asesmen yang komprehensif untuk mengukur aspek kognitif, efektif, dan keterampilan. Sinergi kebijakan pendidikan tinggi, khususnya implementasi prinsip Belajar Kampus Merdeka, dipandang strategis untuk memfasilitasi pengalaman belajar nyata yang memperkuat internalisasi nilai Pancasila dan mendorong partisipasi politik yang berkualitas di kalangan mahasiswa. Terakhir, kajian ini merekomendasikan penelitian lanjutan berupa evaluasi empiris intervensi pembelajaran (studi quasi eksperimental) untuk mengukur dampak kuantitatif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku kewarganegaraan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'rafiyah, N., Wulandari, T., & Dayati, U. (2019). Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan Dengan Partisipasi Politik Mahasiswa The Correlation Of Civic Knowledge Towards Political Participation. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Benawa, A., Lusia, E., Alwino, A., Irawan, I., & Witono, P. H. (2023). The Effect of Pancasila Education, Civic Education, and Religion Education on Value Education for The Students

During COVID 19 Pandemic. E3S Web of Conferences, 388. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338804008>

Biringan, J., Limeranto, R., & Sample, F. (2025). Approach learning high-order thinking skills to improve civic knowledge in Pancasila and Civic Education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1336>

Cahyono, C., Danial, E., Rahmat, R., & Masyitoh, I. (2023). Meningkatkan Civic Knowledge Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Sistem Asynchronous. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.25114>

Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). <https://doi.org/10.29103/ijevo.v1i5.1617>

Mahardhani, A. J., & Roziq Asrori, M. A. (2023). Internalization of Pancasila Student Profile Values based on Digital Citizenship as Preparation for Industry 4.0 and Implementation of Independent Learning Policy. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 2395–2404. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.2871>

Mathilda, F. (2019). Penerapan Metode Problem Based Learning Pada Mata Kuliah Pancasila Untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Teknik Sipil The Application Of The Problem Based Learning Method In Pancasila Course To Improve The Competence Of Civil Engineering Students.

Nurdiyanti, A., Agus2, A. A., Muhamad3, M. F., & Ikbal4, A. (2023a). Penerapan Project Based Learning Pada Mata Kuliah Pancasila Dalam Memperkuat Civic Engagement Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* Desember, 2023(15), 434–442. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

Pembelajaran, S., Pancasila, P., Kewarganegaraan Sebagai Mata, P., Pembentuk, K., Mahasiswa, K., Istianah, A., Mazid, S., Susanti, R. P., Kewarganegaraan, P., & Karakter, P. (2021). Learning Strategies for Pancasila Education and Citizenship Education as Courses Student Character Shaper. In *Heritage: Journal of Social Studies* | (Vol. 2, Issue 1)